

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perubahan dalam pola pengelolaan keuangan telah menyebabkan peralihan dari sistem sentralisasi di tingkat pemerintah pusat menuju desentralisasi ke pemerintah daerah, yang pada akhirnya mendorong terjadinya transformasi peran pemerintah daerah dari entitas yang dikendalikan menjadi entitas yang memiliki otonomi sendiri. Otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adanya otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola potensi serta sumber daya yang dimiliki secara mandiri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan wujud dari penerapan desentralisasi fiskal (Alvaro & Prasetyo, 2020).

Keberadaan desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan serta efektivitas pelaksanaan penyediaan barang dan jasa publik sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah. Alasannya karena pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap kondisi, potensi, dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya sendiri. Meskipun demikian, upaya

pemenuhan kebutuhan tersebut tetap harus berlandaskan pada tujuan pembangunan sosial dan ekonomi nasional (Diaman *et al.*, 2023)

Desentralisasi dari sudut pandang administrasi publik berkaitan erat dengan bagaimana pemerintah daerah memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan belanja daerah. Belanja daerah pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Salah satu bentuk belanja langsung adalah belanja modal. Belanja modal memiliki tujuan utama untuk menyediakan sarana dan prasarana publik yang berfungsi sebagai penunjang berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran belanja modal secara optimal, karena belanja modal menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas (Nilam Sari & Arodhiskara, 2024).

Belanja Modal merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah yang digunakan untuk memperoleh atau menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat ekonomi lebih dari satu tahun anggaran, sehingga belanja ini sangat berperan penting dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur serta penyediaan sarana dan prasarana publik di daerah (Alvaro & Prasetyo, 2020). Pemanfaatan anggaran belanja ini harus diarahkan pada kegiatan yang bersifat produktif guna menunjang berbagai aktivitas pemerintahan dan masyarakat. Peningkatan alokasi belanja modal dapat mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih baik, yang

pada akhirnya berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi daerah (Nilam Sari & Arodhiskara, 2024).

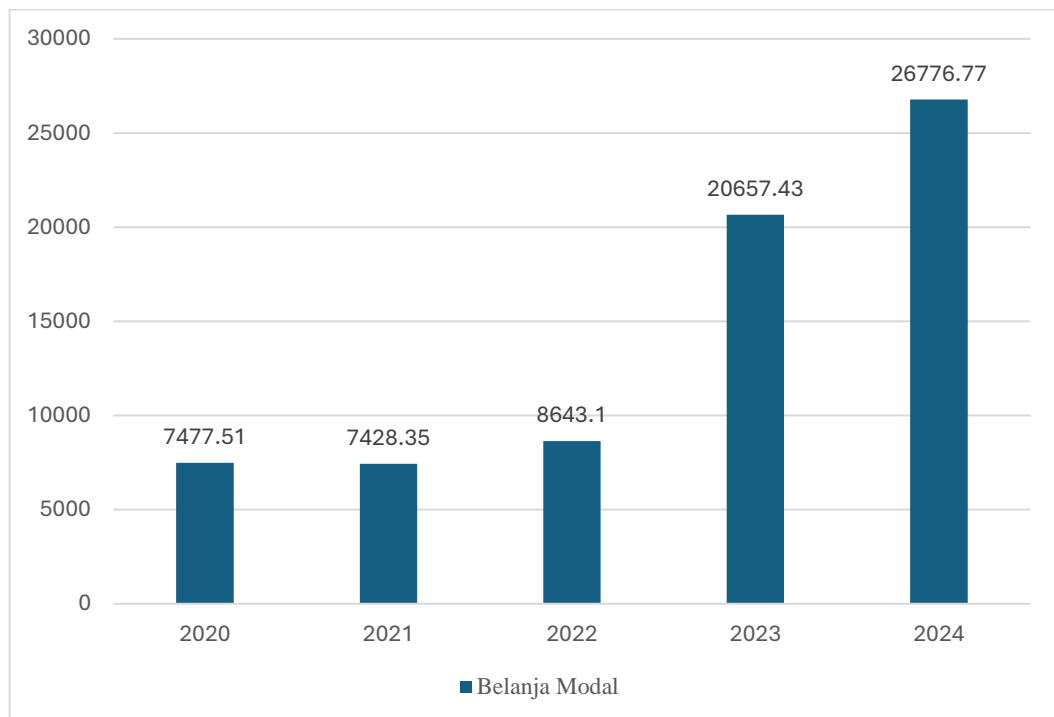
Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Pulau Kalimantan yang memiliki peranan dalam pembangunan nasional. Kalimantan Timur memiliki posisi yang sangat strategis untuk menjadi lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara karena memiliki posisi geografis yang berada di tengah Indonesia, ketersediaan lahan luas milik pemerintah, aksesibilitas yang baik, serta risiko bencana alam yang rendah, yang menjadikannya pusat perhatian nasional dalam konteks pemerataan pembangunan di Indonesia (Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2023).

Pemindahan Ibu Kota Nusantara merupakan langkah pemerintah untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah. Kebijakan ini juga diharapkan dapat memperluas aktivitas ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja baru, percepatan pembangunan infrastruktur, serta pengembangan berbagai sektor ekonomi yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekadar relokasi pusat pemerintahan, melainkan juga merupakan bentuk investasi besar dalam pengembangan wilayah sekitarnya (Rahmalia & Sari, 2024).

Pembangunan IKN diproyeksikan membuka peluang ekonomi baru, khususnya pada sektor properti seperti perumahan, pusat perbelanjaan, dan kawasan bisnis. Dampak positifnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat lokal melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan kesempatan kerja di sekitar kawasan IKN. Pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup penyediaan fasilitas sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Pemerintah

berkomitmen untuk membangun sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, serta pusat layanan kesehatan di wilayah sekitar IKN (Rahmalia & Sari, 2024).

Meningkatnya pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik di Kalimantan Timur seiring dengan percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menyebabkan alokasi belanja modal yang besar dan berkelanjutan dalam rangka mendukung pembangunan tersebut. Untuk menggambarkan kondisi tersebut, berikut realisasi Belanja Modal di Provinsi Kalimantan Timur yang disajikan pada gambar 1.1:



Sumber : DJPK (2024), data diolah penulis

Gambar 1.1
Realisasi Belanja Modal di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024
(dalam miliar)

Berdasarkan gambar 1.1, realisasi Belanja Modal di Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan pada tahun 2021 yang diakibatkan oleh pandemi

Covid-19. Pada tahun 2021, pemerintah berupaya mengurangi belanja modal seperti belanja gedung dan infrastruktur lainnya, serta mengalokasikan anggaran untuk belanja bidang kesehatan serta pemberian bantuan kepada masyarakat, koperasi, dan UMKM yang terdampak Covid-19 (Bhakti *et al.*, 2021). Kemudian, belanja modal mengalami lonjakan drastis setelah tahun 2022, hal ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor eksternal dan kebijakan pembangunan yang menjadi latar belakang dinamika fiskal tersebut. Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi faktor utama lonjakan belanja modal di Kalimantan Timur, dimana mayoritas anggaran digunakan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur di kawasan IKN seperti proyek IKN 1 dan 2, prasarana permukiman, dan penyediaan Perumahan IKN Nusantara (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2024).

Kemampuan daerah dalam melakukan belanja modal sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya pendanaan yang memadai yang berasal dari berbagai sumber seperti Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan (Handayani & Chasanah, 2025). Kedua pendapatan tersebut merupakan sumber utama pembiayaan daerah yang berperan penting dalam menentukan kapasitas fiskal dan arah kebijakan pengeluaran pemerintah daerah, khususnya dalam pengalokasian belanja modal sebagai instrumen pembangunan (Ambya, 2023:144).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berpedoman pada prinsip otonomi yang nyata, luas, dan bertanggung jawab. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang

diperoleh melalui pungutan berdasarkan peraturan daerah yang berlaku (A. Kurniawan, 2024:26). Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Ambya, 2023:122).

PAD mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah dalam membiayai pembangunan dan penyediaan layanan publik. Semakin tinggi PAD yang diperoleh, semakin besar pula kapasitas fiskal pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja modal, terutama dalam pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Handayani & Chasanah, 2025). Namun faktanya, Pendapatan APBD Kalimantan Timur masih didominasi Dana Transfer Pusat yang berasal dari dana perimbangan, sedangkan PAD masih relatif lebih kecil yang menandakan bahwa sebagian besar pembiayaan pembangunan infrastruktur di daerah masih bersumber dari transfer pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2024).

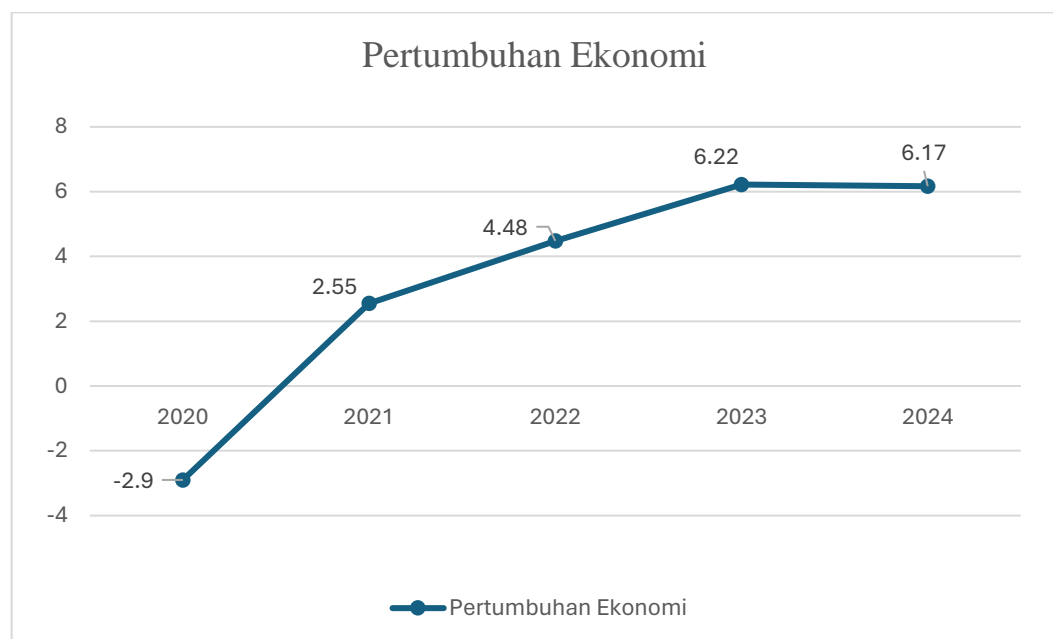
Dana Perimbangan merupakan satu komponen terbesar dalam alokasi transfer ke daerah, sehingga mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah (Diaman *et al.*, 2023). Setiap daerah memiliki kemampuan yang berbeda dalam membiayai berbagai kegiatan pemerintahannya, sehingga menimbulkan potensi ketimpangan fiskal antar daerah, oleh karena itu pemerintah pusat menyalurkan dana transfer yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna membantu pendanaan kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana

Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) salah satunya yang dialokasikan melalui belanja modal (Ambya, 2023:146). Semakin tinggi dana perimbangan, maka semakin besar kemampuan daerah dalam membiayai belanja modal. Dinamika PAD dan Dana Perimbangan menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam melihat kemampuan daerah untuk membiayai belanja modal sebagai instrumen utama pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik (Muttaqin *et al.*, 2021).

Selanjutnya pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai variabel moderasi yang mencerminkan sejauh mana peningkatan kapasitas ekonomi daerah mampu mendorong efektivitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan dana perimbangan untuk membiayai belanja modal. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan output per kapita secara berkelanjutan dalam jangka panjang, yang menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan. Umumnya, semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, semakin meningkat pula tingkat kesejahteraan masyarakat (Irwan *et al.*, 2022).

Ketika pertumbuhan ekonomi daerah meningkat, pendapatan masyarakat dan aktivitas ekonomi juga cenderung naik, sehingga basis pajak dan retribusi daerah semakin luas. Kondisi ini memperbesar potensi PAD dan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja modal pada sektor-sektor produktif. Sebaliknya, ketika pertumbuhan ekonomi melambat, penerimaan daerah berpotensi menurun sehingga belanja modal juga ikut tertekan. Oleh karena itu, daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi diharapkan

lebih efisien dalam mengalihkan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan menjadi investasi pembangunan (Fitrianingsih *et al.*, 2025). Dapat dilihat Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Timur yang disajikan pada gambar 1.2:



Sumber : BPS Kalimantan Timur (2025), data diolah penulis

Gambar 1.2
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Berdasarkan gambar 1.2, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur periode 2020–2024 menunjukkan adanya tren peningkatan yang cukup signifikan, terutama setelah tahun 2022. Pada masa awal pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi sempat melambat akibat penurunan aktivitas industri dan investasi (Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2021). Namun, sejak tahun 2022 hingga 2024, pertumbuhan ekonomi kembali menguat dan mencapai 6,17 persen pada tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,17 persen ini menunjukkan kinerja yang kuat dan stabil, meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh 6,22 persen. Peningkatan ini didorong oleh sektor-sektor produktif seperti

administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, pengadaan listrik dan gas, serta konstruksi, yang semuanya sangat berkaitan dengan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan ekspansi infrastruktur daerah (Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2025).

Aktivitas ekonomi yang meningkat di sektor konstruksi, jasa, dan perdagangan memperluas penerimaan daerah, sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan PAD dan dana perimbangan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang stabil berperan penting dalam memperkuat hubungan antara PAD dan Dana Perimbangan terhadap kemampuan daerah untuk membiayai belanja modal dan mendukung kemandirian fiskal yang berkelanjutan (Fitrianingsih *et al.*, 2025).

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan pembangunan yang produktif, serta melihat sejauh mana kapasitas fiskal dan struktur pendapatan daerah mampu menggambarkan kesiapan Kalimantan Timur dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang membutuhkan penguatan infrastruktur dan peningkatan belanja pembangunan.

Selain fenomena di atas, terdapat inkonsistensi hasil (*research gap*) pada penelitian terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Irwan *et al.* (2022) yang menunjukkan hasil bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi hubungan antara pendapatan asli daerah dan belanja modal, sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi secara negatif hubungan

antara dana perimbangan dan belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Soesilo dan Asyik (2021) menunjukkan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Hadi dan Kusuma (2023) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal, pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Komala (2023) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap belanja modal, pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024)**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020–2024.
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara bersama-sama terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020–2024.
3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara parsial terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020–2024.
4. Bagaimana peran Pertumbuhan Ekonomi dalam memoderasi pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020–2024.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020–2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara bersama-sama terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020–2024?

3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara parsial terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020–2024.
4. Untuk mengetahui peran Pertumbuhan Ekonomi dalam memoderasi pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020–2024.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan pada bidang Akuntansi Sektor Publik, khususnya mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, serta Pertumbuhan Ekonomi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dengan tercapainya tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis sebagai berikut:

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pemahaman penulis mengenai konsep dan hubungan antara pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, belanja modal, serta pertumbuhan ekonomi dalam konteks pengelolaan keuangan daerah.
2. Bagi lembaga, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai tambahan referensi di lingkungan akademik, khususnya bagi perpustakaan universitas, yang dapat dijadikan acuan atau pembanding dalam

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik serupa, serta menjadi sumber informasi dalam kegiatan perkuliahan di bidang ekonomi dan akuntansi sektor publik.

3. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi serta merumuskan strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), optimalisasi dana perimbangan, pengelolaan belanja modal, serta penguatan pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih transparan dan berbasis data mengenai kondisi keuangan daerah, sehingga masyarakat dapat memahami pentingnya pengelolaan dan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan bersama.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur yang diakses melalui *website* <https://djpk.kemenkeu.go.id> dan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diakses melalui *website* <https://bps.kaltim.go.id>.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 7 (tujuh) bulan, dimulai dari bulan Oktober 2025 sampai April 2026. Jadwal penelitian dapat dilihat pada lampiran 01.